PENGARUH KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*
(Survei Pada Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Soreang)

THE INFLUENCE OF QUALITY INFORMATION FINANCIAL ACCOUNTING AND COMPLIANCE TAX PAYERS TOWARD SELF ASSESSMENT SYSTEM
(*Survey on tax payers of The Small taxpayers offices in Soreang*)

Oleh
Carolina Toman Halomoan
21111139

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

Self assessment system is influenced by several factors, including the quality of financial accounting information and taxpayer compliance. There are a phenomenon in KPP that the financial statements were not good and poor taxpayer compliance that affect the self assessment system.The purpose of this study was to determine how much influence the quality of financial accounting information and taxpayer compliance against self assessment system on KPP Sumedang.

The method is used in this research is descriptive method, verification with quantitative approach. The analytical method used is multiple regression. Besides previously also classical assumption which include normality test, test Multicollinearity, Heteroskidastity test and autocorrelation test. The results showed that there were no irregularities classical assumptions, it is shown that the available data has been qualified to use multiple linear regression models. The method of analysis used is multiple linier regression analysis with the help of analysis tools SPSS version 21.0.

Results from this study indicate that the earning per share has a significant influence on quality of financial accounting information and tax payers compliance has significant effect on self assessment system.

Keywords : Quality of financial accounting information, tax payers compliance, dan self assessment system

---

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan negara disektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun, sebagai upaya bangsa kita untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada bantuan luar, sebagaimana yang diharapkan dalam Pokok-Pokok Pikiran Dan Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, bahwa kebijakan pokok dibidang pajak ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan. Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah. (Ari Bramasto:2012)

Sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assessment system*

merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada *Fiskus* untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. (Tarjo & Indra Kusumawati : 2006)

Self assessment system merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. (Tarjo & Indra Kusumawati : 2006) Dalam *Self assessment system* SPT merupakan sarana yang paling mutlak bagi wajib pajak untuk melaporkan dengan benar semua hal tentang wajib pajak mulai dari identitas, kegiatan usaha sampai jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan perpajakan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika perhatian secara penuh diberikan pada penyempurnaan SPT baik dalam masalah bentuk, isi, dan susunannya sehingga SPT merupakan saran yang handal bagi tercapainya tujuan perpajakan. (Tarjo & Indra Kusumawati, 2006)

Keuntungan *self assessment system* ini, Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (Fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi perhitungannya, fungsi yang memberi hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Atas dasar fungsi perhitungan tersebut Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau kantor pos. Selanjutnya Wajib Pajak melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). (Tarjo & Indra Kusumawati : 2006)

Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya. (Sadhani,2004)

Seperti yang dikemukakan oleh Liberty Pandiangan (2002), di Indonesia sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku pajak dikelola pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam APBD. Dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi serta sejalan dengan dinamika perkembangan kehidupan dunia usaha., pemerintah telah melakukan reformasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. sebagai upaya untuk memberikan keadilan, kemudahan / efisiensi administrasi, dan produktivitas bagi penerimaan negara, disamping penerapan sistem *self assesment* yang lebih baik. (Liberty Pandiangan : 2002)

Wajib Pajak tidak boleh diperlakukan sebagai obyek, tetapi sebagai subyek yang harus dibina agar bersedia, mampu dan sadar melaksanakan kewajiban perpajakan (Sofyan, 2003). Sedangkan Sadhani (2004) mengemukakan bahwa guna melakukan penilaian tingkat efisiensi suatu sistem perpajakan, terdapat dua elemen dasar yang selalu menjadi acuan, yaitu (1) biaya administrasi perpajakan; dan (2) biaya kepatuhan perpajakan (*compliance of taxation*). Sistem perpajakan dikatakan efisien apabila biaya kedua elemen tersebut rendah. Reformasi Perpajakan di Indonesia yang diikuti dengan penyempurnaan perangkat perundangannya juga belum mendorong dan merangsang wajib pajak segera memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. (Ari Bramasto:2012)

Dalam sistem yang menekankan keaktifan wajib pajak ini memerlukan *tax compliance* (kepatuhan perpajakan). Kepatuhan perpajakan tersebut sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia. Namun, lebih dari itu kepatuhan perpajakan dapat dikatakan sebagai tulang punggung *self assessment system* dimana dibutuhkan suatu

kerelaan dari wajib pajak itu sendiri untuk melaksanakan kewajibannya sehingga sistem tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (Dahliana Hasan,2008:1).

Disisi lain Wajib Pajak harus membuktikan kepada aparat pajak (dalam pemeriksaan) bahwa kegiatan pembayaran pajak atau dasar pembayaran pajak sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Oleh karena itu, untuk mendokumentasikan kegiatan Wajib Pajak tersebut, Wajib Pajak harus mengadakan pembukuan atau pencatatan. Wajib Pajak badan wajib melakukan pembukuan sedang Wajib Pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu diperbolehkan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto. (Direktorat Penyuluhan Perpajakan : 2001)

Seiring dengan upaya optimalisasi penerimaan pajak, diharapkan pelayanan publik yang dilakukan oleh Fiskus dapat lebih ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik, yang mengharuskan setiap penyelenggaraan pelayanan publik memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan, termasuk pelayanan di bidang perpajakan. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada Wajib Pajak.

Salah satu unsur yang terkait dengan penyelenggaraan pembukuan wajib pajak adalah laporan keuangan (Informasi Akuntansi Keuangan). Gunadi (2001) menerangkan bahwa : Kualitas utama agar informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan., minimal harus berintikan relevansi, keandalan, komparabilitas, dan konsistensi. Jika unsur-unsur tadi bobotnya kurang, maka informasi akuntansi tidak akan berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan terutama yang menganut sistem Self Assessment.Hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat wajib pajak sebagai subyek pajak yang terlambat dan tidak menyampaikan SPT sehingga menimbulkan dampak negatif berupa tidak diperolehnya kualitas informasi akuntansi keuangan yang andal dalam mengambil keputusan dan masih terdapat wajib pajak yang belum mematuhi kewajiban pajaknya dan tidak menyampaikan informasi akuntansi keuangan sehingga tingkat tercapainya penerimaan pajak pengahasilan sesuai dengan target yang ditetapkan belum efektif. (Gunadi, 2001)

Akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan, hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat wajib pajak sebagai subjek pajak yang terlambat dan tidak mengumpulkan SPT sehingga menimbulkan dampak negatif berupa tidak diperolehnya kualitas informasi akuntansi keuangan yang andal dalam mengambil keputusan dan masih banyak wajib pajak yang belum mematuhi kewajiban pajaknya dan tidak menyampaikan informasi akuntansi keuangan sehingga tingkat tercapainya pajak penerimaan pajak penghasilan sesuai dengan target yang ditentukan belum efektif (Ari Brasmasto,2012)

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu, selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh pemerintah perlu juga dibarengi dengan upaya penegakan hukum (*tax low enforcement*). Diwujudkannya dalam pengenaan sanksi, tujuannya untuk mencapai tingkat keadilan yang diha rapkan dalam pemungutan pajak. Penegakan hukum dalam *self assessment system* merupakan hal penting, karena tuntutan peran aktif dari Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan dari wajib sangatlah penting. Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak perlu ditegakkan melalui *tax law enforcement*, salah satunya dengan adanya sanksi pajak (*tax penalties*). (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006:131)

Berdasarkan uraian diatas tentang pelaksanaan *self assessment system* pada Wajib Pajak maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* (Survey pada Wajib Pajak KPP Soreang")**

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberpa besar pengaruh kualitas informasi akuntansi keuangan dalam pelaksanaan *self assessment system*.

2. Seberapa besar pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan *self assessment system*.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2001) Informasi akuntansi keuangan digunakan baik oleh manajer maupun pihak eksternal perusahaan, dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengamblan keputusan ekonomi".

Indikator kualitas informasi akuntansi keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007:7) terdiri atas Dapat dipahami, Relevan, Keandalan, dan dapat dipahami.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Norman D.Nowak yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2007 : 31) kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undang perpajakan.

Untuk mengukur kepatuhan wajib pajak digunakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) sebaga berikut: Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam membayar tunggakan.

2.1.3 *Self Assessment System*

Menurut John Hutagaol (2002:7), *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Kewajiban wajib pajak dalam *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:103) terdiri dari: Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak, menghitung pajak oleh wajib pajak, membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak, serta pelaporan dilakukan wajib pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Earning per Share* terhadap *Return* Saham

Hubungan antara Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap *Self Assessment System* diungkapkan oleh Gunadi (2001:52) menerangkan bahwa Kualitas utama agar informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan, minimal harus berintikan relevansi, keandalan, komparabilitas, dan konsistensi. Jika unsur-unsur tadi bobotnya kurang, maka informasi akuntansi tidak akan berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan terutama yang menganut sistem *Self Assessment*.

Teori diatas didukung oleh penelitian terdahulu menurut Ari Bramasto (2012) "Kualitas informasi akuntansi keuangan yang terdiri dari benar, lengkap, dan jelas secara parsial (individu) berpengaruh signifikan terhadap *self assessment system*.

2.2.2 Pengaruh *Debt to Equity Ratio* Terhadap *Return* Saham

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:38) menyatakan bahwa kepatuhan memiliki kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*. Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut.

Teori diatas didukung dengan penelitian terdahulu menurut Uum Helmina Chaerunisak (2014) mengatakan bahwa hubungan antara Kepatuhan wajib pajak dengan *self assesment*

system yaitu kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh signifikan terhadap penerapan *self assessment system*.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka Penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : *Earning per share* berpengaruh terhadap return saham.

H2 : *Debt to equity ratio* berpengaruh terhadap *return* saham.

III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2009:4) Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif.

3.2 Operasional Variabel

Menurut Umi Narimawati (2010:31) operasional variabel adalah proses penguraian penelitian ke dalam sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran.

Sesuai dengan judul penelitian yaitu "Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*". Maka terdapat tiga variabel yaitu:

1. Variabel Bebas / *Independent* (X)
   Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan dan Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Variabel Terikat / *Dependent* (Y)
   Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah *Self Assessment System*.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Menurut Umar Husein (2005:41) data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Wawancara *(Interview),*yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Wawancara dilakukan dengan melakukan Tanya jawab dengan narasumber yang dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan penelitian.
2) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya. Kuesioner, berisi daftar pertanyaan pernyataan yang diberikan kepada Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak. Alat penelitian berupa daftar pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh keterangan dari sejumlah responden. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut nantinya akan dihitung secara statistik kuesioner berupa data-data mengenai Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap *Self Assessment System* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut Narimawati Umi (2008:72), populasi adalah objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai informasi yang ditetapkan oleh peneliti, sebagai unit analisis penelitian.

Berdasarkan pada pengertian diatas, yang menjadi populasi sasarannya adalah Wajib Pajak Badan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang, dengan jumlah wajib pajak badan sebanyak 8786.

3.4.2 Penarikan Sampel

Menurut Narimawati Umi (2008:77) memberikan pengertian sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk menjadi unit pengamatan dalam penelitian.

Untuk mengetahui ukuran sampel dari populasi yang diketahui jumlahnya, peneliti menggunakan Rumus Slovin, berikut rumus yang digunakan:

$$n = \frac{N}{(N.e^2)+1}$$

Sumber: Umi Narimawati (2010)

Berdasarkan rumus penarikan sampel diatas, maka penulis mengambil sampel sebanyak 100 orang wajib pajak badan.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

3.5 Metode Pengujian Data

3.5.1 Uji Normalitas Data Residual

Menurut Husein Umar (2011:182) uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak".

Pengujian secara visual dapat juga dilakukan dengan metode gambar normal *Probability Plots* dalam program SPSS. Dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.5.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Gujarati (2004:362) mendefinisikan uji multikolinearitas merupakan suatu situasi dimana beberapa atau semua variabel bebas berkolerasi kuat".

Jika terdapat kolerasi yang kuat di antara sesama variabel independen maka konsekuensinya adalah:

1. Koefesien – koefesien regresi menjadi tidak dapat ditaksir.
2. Nilai standar error setiap koefesien regresi menjadi tidak terhingga.

Dengan demikian berarti semakin besar kolerasi diantara sesama variabel independen, maka tingkat kesalahan dari koefesien regresi semakin besar yang mengakibatkan standar errornya semakin besar pula. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas adalah dengan menggunakan *Variance Inflaction Factors (VIF).*

Rumus untuk menghitung VIF adalah sebagai berikut :

$$\text{VIF} = \frac{1}{1 - \text{R}_\text{i}^2}$$

Sumber: Umar Husein (2011:179)

Menurut Gurajati (2003 :362) uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai VIF nya kurang dari 10 maka dalam data tidak terdapat Multikolinieritas.

3.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Husein Umar (2011:179) mendefinisikan uji heteroskedastisitas adalah dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain".

Salah satu cara untuk mendekteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot.

3.5.4 Uji Autokorelasi

Menurut Husein Umar (2011:182) autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian".

Cara untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi dalam suatu model regresi dalam penelitian ini digunakan uji *Durbin-Watson* (DW Test). Uji Durbin-Waston digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variable lagi di antara variable bebas.

Rumus perhitungan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi tersebut adalah sebagai berikut :

$$D - W = \frac{\sum (e_t - e_{t-1})}{\sum e_t^2}$$

(Gujarati, 2003: 467)

3.6 Rancangan Analisis dan pengujian Hipotesis

3.6.1 Rancangan Analisis

Menurut Umi Narimawati (2010:41) mendefinisikan rancangan analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain".

a. Analisis Deskriptif atau Kualitatif

Menurut Sugiyono (2010:14) mendefinisikan analisis kualitatif sebagai berikut:

"Metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara insentif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati – hati apa yang terjadi, melakukan analisis refleksi terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail".

b. Analisis Verifikatif atau Kuantitatif

Adapun analisis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan pengaruh *earning per share, debt to equity ratio* dan *return* saham.

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Keterangan:

Y = *Self Assessment System*

X_1 = Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan

X_2 = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta, merupakan nilai terikat yang dalam hal ini adalah Y padasaat variabel bebasnya adalah 0 (X_1 dan X_2 = 0)

β_1 = Koefisien regresi multiple antara variabel bebas X_1 terhadap variableterikat Y, bila variabel bebas lainnya dianggap konstan.

3.6.2 Pengujian Hipotesis

a. Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_0 ; $\beta_1 = 0$, *earning per share* tidak berpengaruh signifikan terhadap *return* saham.

Ha ; $\beta_1 \neq 0$, *earning per share* berpengaruh signifikan terhadap *return* saham.

H_0 ; $\beta = 0$, *debt to equity ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return* Saham.

Ha ; $\beta \neq 0$, *debt to equity ratio* berpengaruh signifikan terhadap *return* saham.

b. Menentukan Tingkat Signifikan

Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk)=(n-k-1), untuk menentukan ttabel sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel-variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikansi yang umum digunakan dalam suatu penelitian.

c. Menentukan kesimpulan berdasarkan perbandingan thitung dengan ttabel

H0 ditolak apabila thitung < ttabel (α = 0,05). Kriteria penarikan pengujian:

Jika menggunakan tingkat kekeliruan (α = 0,01) untuk diuji dua pihak, maka criteria penerimaan atau penolakan hipotesis yaitu sebagai berikut:

1. Jika thitung ≥ ttabel maka H0 ada didaerah penolakan, berarti Ha diterima artinya antara variabel bebas dan variabel terikat ada hubungannya.
2. Jika thitung ≤ ttabel maka H0 ada didaerah penerimaan, berarti Ha ditolak artinya antara variabel bebas dan variabel terikat tidak ada hubungannya.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian

4.1.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Berdasarkan grafik normalitas menggunakan normal *p-plot*, diketahui bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal yang menunjukan bahwa data sudah memenuhi asumsi normalitas terbukti dari normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* sebagai berikut.

2. Uji Multikoliniearitas

Berdasarkan output, diketahui bahwa kedua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki masalah *multikolinierita*s.

3. Uji Heteroskedastisitas

Diketahui titik-titik yang diperoleh menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu atau menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada data yang diteliti tidak ditemukan masalah *heteroskedastisitas*.

3.1.2 Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap *Self assessment System*

1. Koefisien Korelasi Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap *Self assessment System*

Diperoleh informasi bahwa nilai korelasi (R) yang diperoleh antara Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan dengan *Self Assesment System* adalah sebesar 0,446dan termasuk dalam kategori hubungan yang “sedang”ada pada interval 0,40–0,599. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat hubungan yang sedang antara Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan dengan *Self Assesment System*.

2. Koefisien Determinasi Parsial Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap *Self assessment System*

Diperoleh informasi bahwa secara koefisien determinasi variabel Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan memberikan pengaruh terhadap *Self Assesment System* sebesar 10,0% dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak memberikan pengaruh sebesar 19,7%, sehingga total pengaruh yang diberikan kedua variabel bebas adalah sebesar 29,7%.

3. Pengujian Hipotesis Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap *Self assessment System*

Dari tabel output SPSS diperoleh nilai t_{hitung}untuk variabel Kualitas Informasi Akuntansi Keuanganadalah sebesar 2,143>$t_{tabel\ (0,05)}$ (1,985) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima Ha, artinya secara parsial Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap *Self Assesment System*.

3.1.3 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap *Self Assessment System*

1. Koefisien Korelasi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap *Self Assessment System*

Diperoleh informasi bahwa nilai korelasi (R) yang diperoleh antara Kepatuhan Wajib Pajak dengan *Self Assesment System* adalah sebesar 0,513dan termasuk dalam kategori hubungan yang "sedang"ada pada interval 0,40–0,599. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat hubungan yang sedang antara Kepatuhan Wajib Pajakdengan *Self Assesment System*.

2. Koefisien Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap *Self Assessment System*

Diperoleh informasi bahwa secara koefisien determinasi variabel Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan memberikan pengaruh terhadap *Self Assesment System* sebesar 10,0% dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak memberikan pengaruh sebesar 19,7%, sehingga total pengaruh yang diberikan kedua variabel bebas adalah sebesar 29,7%.

3. Pengujian Hipotesis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap *Self Assessment System*

Dari tabel output SPSS diperoleh nilai t_{hitung}untuk Kepatuhan Wajib Pajakadalah sebesar 3,664>$t_{tabel\ (0,05)}$ (1,985) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima Ha, artinya secara parsialKepatuhan Wajib Pajakberpengaruh signifikan terhadap *Self Assesment System*.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Analisis Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara kualitas informasi akuntansi keuangan terhadap *self assessment system*r=0,446 dan termasuk dalam kategori hubungan yang "sedang" ada pada interval 0,40-0,599.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat hubungan yang sedang antara kualitas informasi akuntansi keuangan dengan *self assessment* system.

Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Gunadi (2001:52) bahwa kualitas utama agar informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan, minimal harus berintikan relevansi, keandalan, komparabilitas, dan konsistensi. Jika unsur-unsur tadi bobotnya kurang, maka informasi akuntansi tidak akan berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan terutama yang menganut sistem *Self Assessment*.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian hipotesis memberikan bukti empiris bahwa variabel kualitas informasi akuntansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan *self assessment system*,hal ini menguatkan hasil penelitian terdahulu oleh Ari Bramasto (2012) bahwa kualitas informasi akuntansi keuangan yang terdiri dari benar, lengkap, dan jelas secara parsial (individu) berpengaruh signifikan terhadap *self assessment system*.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu hal tersebut berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan bahwa informasi akuntansi keuangan harus dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Tetapi yang terjadi dilapangan informasi akuntansi keuangan (laporan keuangan) yang disajikan masih ada yang tidak dapat dipahami oleh wajib pajak pada KPP Pratama Soreang.

3.2.2 Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa kefisien korelasi antara kepatuhan wajib pajak terhadap *self assessment system* adalah r=0,513 dan termasuk dalam kategori hubungan yang "sedang" ada pada interval 0,40 – 0,599. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

secara parsial terdapat hubungan yang sedang antara kepatuhan wajib pajak terhadap *self assessment system*.

Hasil penelitian mendukung teori yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:38) menyatakan bahwa kepatuhan memiliki kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*. Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa variabel kepatuhan wajib pajak terhadap *self assessment system* berpengaruh secara signifikan. Hal ini menguatkan hail penelitian terdahulu olehUum Helmina Chaerunisak (2014) mengatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak sangat berpengaruh signifikan terhadap penerapan *self assessment system*.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu hal tersebut berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan bahwa dengan konsekuensi logis kepatuhan wajib pajak secara sukarela merupakan kewajiban wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya apalagi dengan pelaksanaan *self assessment system* yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Para wajib pajak akhirnya mau tidak mau harus memilki kesadaran dalam mematuhi kepatuhan wajib pajak seperti melaporkan SPT, menghitung dan membayar pajak terutang, serta kepatuhan dalam membayar tunggakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perpajakan.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan tergolong berpengaruh signifikan terhadap *Self Assessment System* pada KPP Soreang.
2. Kepatuhan Wajib Pajaktergolong berpengaruh signifikan terhadap *self assessment system* pada KPP Soreang.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

1. Agar pengaruh kualitas informasi akuntansi dalam menentukan *self assessment system* di KPP Soreang, sebaiknya wajib pajak harus mengisi laporan keuangan yang benar agar memperoleh informasi akuntansi keuangan yang andal dalam mengambil keputusan.
2. Bagi Wajib Pajak KPP Soreang sebaiknya sadar akan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam kepatuhan melaporkan SPT dan membayar pajak terutang.

5.2.2 Saran Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu
   Disarankan para peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan unit analisis dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung terhadap teori dan konsep diterima secara umum.
2. Bagi Peneliti Lain
   Diharapkan agar para peneliti lain dapat lebih memberikan bukti empiris dari konsep yang telah dikaji bahwa Pelaksanaan *Self Assessment System* dapat dipengaruhi oleh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

IV DAFTAR PUSTAKA

Ari Bramasto. 2012. ”Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Efektivitas Sistem *Self Assessment*”. Majalah Ilmiah Unikom Vol.10 No.2

Tarjo & Indra Kusumawati. 2006. “Analisis Perilaku Wajib Pajka Orang Pribadi terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*: Suatu Studi di Bangkalan”. JAAI, Juni 2006. 10(1)

Sahdani, D.(2004). *Peran serta Akuntan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib pajak. Makalah disampaikan pada Kongres Nasional Ikatan Akuntan Ikatan Indonesia* V. Yogyakarta

IAI,2004. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2001). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Salemba Empat, Jakarta.

Wilkinson, Joseph. 2000. *Sistem Informasi dan Akuntansi*. Edisi 3. Banirupa Aksara: Jakarta

Sugiyono.2005. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabet
Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta : Bandung

Masyhuri dan M. Zainudin. (2009). *Metode Penelitian*. Bandung. Replika Aditama
Mohammad Nazir, 2003. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Narimawati, Umi, Anggadini, S.D. & Ismawati, L. 2010. *Penilisan Karya Ilmiah: Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM*. Bekasi: Genesis.

Umar, Husein. 2005. Metode *Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan : Teori & Kasus (Edisi Pertama).* Jakarta : Salemba Empat.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta : Graha Ilmu.